

Abstrak

Kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan dan Untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggungjawab. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan melalui berbagai cara, seperti Penerapan regulasi dan peraturan, Pemberian sertifikasi, Monitoring dan evaluasi, Penerapan sanksi. Dan Dalam mengatasi masalah pelaku jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggung jawab seperti memasang kabel di tiang listrik PLN tanpa izin, pemerintah bisa melakukan beberapa hal berikut Penegakan hukum, Koordinasi dengan PLN, Sosialisasi, Pemberian sanksi

kata kunci: **Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha**

Abstract

The authority of the Jember district government in supervising subscription broadcasting service business actors. This study aims to determine the authority of the Jember district government in supervising subscription broadcasting service business actors and to determine the government's efforts towards irresponsible subscription broadcasting service business actors. The research used is normative legal research. The data used are secondary data sourced from primary and secondary legal materials. Data analysis used in this research is qualitative analysis. From the results of the study it can be concluded that the authority of the Jember district government in supervising subscription broadcasting service business actors aims to ensure that the services received by the community are in accordance with established standards and in accordance with applicable regulations. In this case, The government has the authority to supervise business actors in subscription broadcasting services through various means, such as Application of regulations and regulations, Granting of certification, Monitoring and evaluation, Application of sanctions. And in overcoming the problem of irresponsible subscription broadcasting service actors such as installing cables on PLN power poles without permission, the government can do the following things: law enforcement, coordination with PLN, socialization, imposition of sanctions.

Keywords: Authority, Local Government, Business Actor

